Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan
Vol. 5, No. 1, Agustus 2026

E-ISSN : 2963-9247
https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/pyt/index

INDIKATOR TATA KELOLA DESTINASI BERBASIS REGENERATIVE TOURISM: ANALISIS KOMPARATIF STUDI KASUS GLOBAL

Putu Arya Reksa Anggratyas[1], Danu Satria Prayuda [2], I Made Ngurah Oka Mahardika [3], I Made Sugita Darmateja[4], Joko Prayitno[5]
Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram[1,3,4,5], Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram [2]

Email: reksa.anggratyas@iahn-gdepudja.ac.id[1], danuipok@gmail.com[2], ngurahokamahardika@gmail.com [3], darmateja.ims@iahn-gdepudja.ac.id[4], jokoprayitno.a22@gmail.com[5]

ABSTRACT

Global tourism is currently at a critical juncture due to the failure of conventional sustainability paradigms in mitigating ecological degradation and socio-cultural erosion caused by overtourism. This study aims to formulate and analyze adaptive destination governance indicators based on regenerative tourism, shifting the focus from harm minimization to net-positive impact. Employing a qualitative descriptive design via systematic narrative review and thematic synthesis, this research comparatively analyzes global case studies across three typologies: rural/cultural heritage (e.g., Naro, Italy; Penglipuran, Indonesia), coastal areas (e.g., Mar Menor, Spain; Pemuteran, Indonesia), and small islands (e.g., Kaua'i, USA; Gili Trawangan, Indonesia). The findings construct three core dimensions of regenerative governance: ecological restoration (coral recovery, circular economy, adaptive carrying capacity), socio-cultural vitality (customary institutional authority, intergenerational knowledge transmission, visitor reciprocity), and regenerative economy (local economic retention, inclusive entrepreneurship). The study reveals that the primary obstacles to implementation are not theoretical, but lie in 'consensus inertia' within rural communities, institutional sectoralism in coastal regions, and absentee ownership in small islands. In conclusion, the transition to regenerative tourism mandates the replacement of quantitative visitor metrics with measurable socio-ecological recovery indicators through adaptive co-management, ensuring destinations rebuild their environmental and communal resilience.

Keywords : regenerative tourism, destination governance, destination impact, destination social responsibility, adaptive carrying capacity

---

ABSTRAK

Pariwisata global saat ini berada pada titik kritis akibat kegagalan paradigma keberlanjutan konvensional dalam menahan laju degradasi ekologis dan erosi sosial-budaya akibat overtourism. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis indikator tata kelola destinasi yang adaptif berbasis pariwisata regeneratif, yang menggeser fokus dari sekadar meminimalkan kerusakan menuju penciptaan dampak positif bersih (net-positive impact). Menggunakan desain kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur sistematis dan sintesis tematik, penelitian ini menganalisis secara komparatif studi kasus global pada tiga tipologi destinasi: pedesaan/warisan budaya

(contoh: Naro, Italia; Penglipuran, Indonesia), kawasan pesisir (contoh: Mar Menor, Spanyol; Pemuteran, Indonesia), dan pulau-pulau kecil (contoh: Kaua'i, AS; Gili Trawangan, Indonesia). Hasil penelitian mengonstruksi tiga dimensi utama tata kelola regeneratif: restorasi ekologis (pemulihan terumbu karang, ekonomi sirkular, daya dukung adaptif), vitalitas sosio-budaya (otoritas kelembagaan adat, transmisi pengetahuan antargenerasi, timbal balik wisatawan), dan ekonomi regeneratif (retensi ekonomi lokal, kewirausahaan inklusif). Studi ini mengungkap bahwa hambatan utama implementasi bukanlah ketiadaan teori, melainkan 'kelambatan konsensus' (consensus inertia) di pedesaan, sektoralisme antarlembaga di pesisir, dan dominasi modal luar (absentee ownership) di kepulauan. Kesimpulannya, transisi menuju pariwisata regeneratif mewajibkan pergantian metrik kuantitas kunjungan menjadi indikator pemulihan sosio-ekologis yang terukur melalui skema adaptive co-management, guna memastikan destinasi mampu memulihkan kembali ketahanan ekosistem dan masyarakat lokalnya.

Kata Kunci : pariwisata regeneratif, tata kelola destinasi, dampak destinasi, tanggung jawab sosial destinasi, daya dukung adaptif

PENDAHULUAN

Industri pariwisata global saat ini berada pada titik kritis akibat kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi lingkungan. Di tingkat internasional, destinasi populer seperti Venesia, Barcelona, dan Hawaii mengalami penurunan kualitas lingkungan serta konflik sosial akibat lonjakan kunjungan wisatawan yang melebihi kapasitas (overtourism) (Hussain, 2025; Zaman et al., 2023). Kerentanan ekologis dan sosial akibat overtourism ini tidak terikat oleh batas geografis antara Global Utara maupun Selatan, melainkan merupakan wujud nyata dari kegagalan sistemik ontologi tata kelola pariwisata yang terlalu berorientasi pada ekstraksi volume. Fenomena serupa terjadi di Indonesia, di mana destinasi utama seperti Bali dan Gili Trawangan menghadapi degradasi terumbu karang, krisis air bersih, serta permasalahan sampah laut akibat pembangunan pesisir yang tidak terkendali (Murdana et al., 2026; Taufik et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pariwisata pada logika pertumbuhan kuantitatif telah mengorbankan modal alam dan sosial yang menjadi fondasi utama destinasi itu sendiri (Grilli et al., 2021; Murdana et al., 2026).

Sebagai respons atas kerusakan tersebut, konsep sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) telah lama diterapkan di berbagai negara untuk menekan dampak negatif industri. Namun, berbagai studi global mengkritik bahwa pendekatan berkelanjutan konvensional sering kali hanya berfokus pada efisiensi sumber daya dan upaya meminimalkan kerusakan (harm minimization atau do no harm) tanpa memulihkan daya dukung lingkungan yang telah rusak (Bellato et al., 2023; McLoughlin, 2025). Di Indonesia, implementasi pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kerap terbentur pada kesenjangan pelaksanaan, di mana kebijakan keberlanjutan hanya berhenti pada wacana administratif tanpa aksi restorasi nyata di lapangan (Taufik et al., 2025; Widari & Prasiasa, 2026). Akibatnya, pemeliharaan status quo dalam pariwisata berkelanjutan dinilai tidak lagi cukup untuk menghadapi krisis ekologis dan sosial masa kini (Dredge, 2022; Iddawala & Lee, 2025).

Keterbatasan paradigma keberlanjutan konvensional mendorong lahirnya paradigma regenerative tourism (pariwisata regeneratif) sebagai pendekatan transformatif baru. Di kawasan Aotearoa Selandia Baru dan Hawaii, pariwisata regeneratif mulai diintegrasikan ke dalam kebijakan publik untuk menggeser fokus dari sekadar meminimalkan dampak menjadi menciptakan dampak positif bersih (net-positive impact) bagi masyarakat dan lingkungan (Becken & Kaur, 2021; Pung et al., 2024; Zaman et al., 2023). Paradigma ini memandang destinasi sebagai sebuah living system (sistem kehidupan terintegrasi) yang menuntut partisipasi aktif wisatawan dan pengelola untuk memulihkan ekosistem, memperkuat daya lentur (resilience), serta menyembuhkan tatanan sosial yang rusak (Bellato & Pollock, 2025; Dredge, 2022). Dalam lanskap lokal Indonesia, prinsip regeneratif ini sebenarnya memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai kearifan lokal seperti filosofi Tri Hita Karana di Bali atau kelembagaan adat sasi dan awig-awig di kawasan pesisir (Murdana et al., 2026; Widari et al., 2025).

Secara konseptual, pengelolaan destinasi berbasis pariwisata regeneratif berkaitan erat dengan manifestasi Destination Social Responsibility (DSR) dan prinsip pengayoman destinasi (destination stewardship). Destination Social Responsibility (DSR) dapat didefinisikan sebagai komitmen etis kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip restorasi sosial dan lingkungan ke dalam setiap kebijakan operasional pariwisata, melampaui sekadar kepatuhan regulasi formal (Agapito et al., 2023; Pratama et al., 2025). Studi internasional menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif lintas sektor untuk memastikan pariwisata memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan komunitas (Montes de Oca, 2024; Sudiartha et al., 2025). Praktik di tingkat lokal, seperti di Desa Wisata Penglipuran, memperlihatkan bahwa keberhasilan DSR organik yang berakar pada budaya lokal mulai terancam oleh euforia ekonomi (erosion by success), sehingga membutuhkan kerangka regeneratif untuk memulihkan kembali partisipasi dan kesadaran kolektif masyarakat (Pratama et al., 2025; Saputra et al., 2026).

Meskipun diskursus pariwisata regeneratif berkembang pesat secara global, perumusan indikator tata kelola yang konkret dan terukur masih menjadi tantangan mendasar dalam literatur ilmiah saat ini. Kajian di berbagai destinasi internasional seperti Kaikōura (Selandia Baru) dan Penghu (Taiwan) menunjukkan bahwa praktik regeneratif masih didominasi oleh deskripsi kualitatif atau indikator konvensional seperti jumlah kunjungan dan tingkat kepadatan, yang belum mampu mengukur pemulihan sosio-ekologis secara komprehensif (Hall et al., 2024; Sudiartha et al., 2025; Wu & Tsai, 2016). Di Indonesia, ketidakjelasan indikator operasional ini membuat para pengelola destinasi di wilayah pesisir maupun pedesaan kesulitan menerjemahkan filosofi regeneratif ke dalam tolok ukur kinerja yang nyata (Dwi et al., 2026; Pratama et al., 2025; Sudiartha et al., 2025).

Guna mengisi kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis indikator tata kelola destinasi berbasis regenerative tourism melalui analisis komparatif studi kasus global. Penelitian ini mengkomparasikan implementasi tata kelola pada berbagai tipologi destinasi global, mulai dari kawasan pedesaan warisan budaya, wilayah pesisir, hingga pulau-pulau kecil.

Melalui pendekatan komparatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis berupa kerangka indikator tata kelola yang adaptif dan terukur bagi keberlanjutan destinasi di tingkat nasional maupun internasional.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumentasi dan tinjauan literatur sistematis (*systematic narrative review*). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mensintesis secara mendalam konsep-konsep abstrak mengenai tata kelola *regenerative tourism*, *Destination Social Responsibility* (DSR), serta *destination stewardship* yang berkembang dalam literatur global. Desain kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komparatif lintas geografis, mencakup tipologi destinasi pedesaan/budaya, pesisir, dan pulau-pulau kecil, guna merumuskan kerangka indikator tata kelola yang terukur dan berterima secara universal namun tetap peka terhadap konteks lokal.

Sumber dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional, buku teks, serta laporan resmi organisasi pariwisata dunia yang terbit dalam rentang tahun 2021 hingga 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis (*systematic literature search*) pada basis data akademis utama seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan portal jurnal ilmiah terindeks. kata kunci penelusuran yang digunakan meliputi kombinasi frasa *"regenerative tourism governance"*, *"destination stewardship indicators"*, *"destination social responsibility"*, *"community-driven regenerative entrepreneurship"*, serta *"island and coastal regenerative tourism"*. Studi kasus yang dipilih sebagai bahan komparasi ditentukan secara purposif (*purposive case selection*) berdasarkan kelengkapan data mengenai tata kelola destinasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mengadopsi analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan sintesis tematik (*thematic synthesis*). Tahapan analisis data dilaksanakan melalui empat urutan sistematis sebagai berikut:

1. Reduksi dan Kodifikasi Data: Memilah, menyaring, dan memberikan kode pada segmen teks utama yang membahas konsep filosofis regeneratif, mekanisme tata kelola destinasi, hambatan, serta bentuk-bentuk indikator penilaian.
2. Konstruksi Dimensi Indikator: Pengelompokan data kodefikasi ke dalam tiga dimensi utama living systems pariwisata regeneratif: Restorasi Ekologis, Revitalisasi Sosio-Budaya dan Kelembagaan Adat, serta Ekonomi Regeneratif.
3. Komparasi Lintas Tipologi: Membandingkan dinamika implementasi indikator tata kelola dan tantangan spesifik pada tiga tipologi destinasi (pedesaan, pesisir, dan pulau kecil) guna menemukan pola konvergensi dan divergensi kelembagaan.
4. Triangulasi Konseptual: Merumuskan matriks indikator tata kelola destinasi regeneratif terpadu yang divalidasi melalui perbandingan silang dengan kerangka teori Tri Hita Karana dan Destination Stewardship.

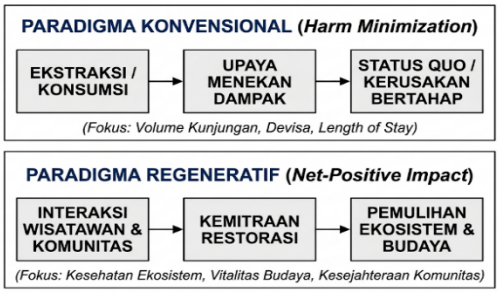
HASIL DAN PEMBAHASAAN

Pergeseran Paradigma: Dari Sustainable Tourism ke Regenerative

Perdebatan teoretis mendasar dalam tata kelola destinasi kontemporer berakar pada kegagalan sustainable tourism konvensional dalam menahan laju degradasi lingkungan dan disrupsi sosial akibat komersialisasi pariwisata (Bellato & Pollock, 2025; Dredge, 2022). Selama beberapa dekade, paradigma keberlanjutan terjebak dalam mechanistic worldview yang memandang destinasi sebagai aset industri statis (Pollock, 2019). Paradigma ini mengukur keberhasilan destinasi melalui variabel kuantitatif seperti volume kunjungan, lama tinggal, dan kontribusi devisa (Dwyer & Kim, 2003; Sudiartha et al., 2025). Namun, pendekatan efisiensi dan mitigasi dampak negatif (harm minimization) terbukti gagal menghentikan kerusakan biologis dan erosi kebudayaan pada destinasi yang mengalami overtourism (Hussain & Fusté-Forné, 2021; Murdana et al., 2026).

Sebagai perbandingan, *regenerative tourism* mengharuskan pemikiran ulang ontologis mendasar melalui *living-systems thinking* (Bellato et al., 2023; Gibbons, 2020). Destinasi dipahami sebagai sistem sosio-ekologis yang dinamis dan terintegrasi, di mana manusia dan alam saling bergantung (Buckton et al., 2023; Iddawala & Lee, 2025). Di tingkat internasional, filosofi ini selaras dengan pandangan masyarakat adat Pasifik seperti Mātauranga Māori di Aotearoa Selandia Baru. Di Indonesia, perspektif ini menemukan padanannya pada kearifan lokal Tri Hita Karana di Bali atau kelembagaan sasi di Maluku yang menekankan keseimbangan antara dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan alam (Murdana et al., 2026; Pratama et al., 2025; Widari & Prasiasa, 2026).

Bagan 1. Perbandingan Paradigma Tata Kelola Destinasi Pariwisata



Sumber: olah data, 2026

Tujuan akhir dari *regenerative tourism* bukan lagi sekadar menekan dampak demi menjaga *status quo* (*net-zero*), melainkan membangun kemitraan restorasi untuk menciptakan dampak positif bersih yang secara nyata meningkatkan kapasitas pemulihan (*self-renewal*) dari ekosistem dan masyarakat lokal.

Sintesis Indikator Tata Kelola Destinasi Berbasis Regenerative Tourism

Berdasarkan sintesis komparatif terhadap literatur global dan kajian kasus terapan, indikator tata kelola pariwisata regeneratif ditransformasikan ke dalam tiga dimensi utama:

1. Dimensi Restorasi Ekologis (*Ecological Restoration*)
   a. Kesehatan & Keanekaragaman Hayati Destinasi: Keberhasilan tidak lagi diukur dari keindahan visual semata, melainkan dari pemulihan riil tutupan terumbu karang (*coral cover recovery*), perluasan vegetasi mangrove, serta peningkatan keanekaragaman hayati lokal (Anggratyas, 2026; Duarte et al., 2024; Ferretti et al., 2023).
   b. Integrasi Ekonomi Sirkular (*Circular Resource Governance*): Indikator ini menilai tingkat kemandirian

destinasi dalam mengelola limbah cair dan padat, pengurangan sampah plastik, dan adopsi energi terbarukan komunal (Das & Mishra, 2026; Saputra et al., 2026).

c. Daya Dukung Lingkungan Adaptif (*Adaptive Carrying Capacity*): Penentuan batas kuota kunjungan yang bersifat dinamis berbasis ambang batas pemulihan alam, bukan pada daya serap pasar atau jumlah tempat tidur (*bed capacity*) semata (Murdana et al., 2026; Sudiartha et al., 2025).

2. Dimensi Revitalisasi Sosio-Budaya & Kelembagaan Adat (*Socio-Cultural & Institutional Vitality*)
   a. Penguatan Otoritas Tata Kelola Komunal: Pelibatan kelembagaan adat/lokal (*awig-awig*, dewan desa, atau struktur kepemimpinan adat Pasifik) sebagai pemegang keputusan tertinggi (*co-designers*) dalam kebijakan destinasi (Becken & Kaur, 2021; Widari & Prasiasa, 2026).
   b. Transmisi Pengetahuan Antar generasi: Keterlibatan aktif generasi muda dalam *digital storytelling* yang berakar pada literasi budaya yang mendalam, guna mencegah pendangkalan makna budaya akibat kebiasaan konten promosi superfisial (Pratama et al., 2025; Saputra et al., 2026).
   c. Kemitraan Kolaboratif Wisatawan (*Tourist-Host Reciprocity*): Pergeseran peran wisatawan dari konsumen pasif menjadi partisipan aktif yang berkontribusi langsung pada aksi penanaman pohon, restorasi terumbu karang, dan konservasi warisan budaya (Dredge, 2022; Pollock, 2019).

3. Dimensi Ekonomi Regeneratif & Kesejahteraan Komunitas (*Regenerative Economy*)
   a. Retensi Nilai Ekonomi Lokal (*Local Economic Retention*): Penekanan pada mitigasi kebocoran ekonomi (*economic leakage*) dengan memaksimalkan penggunaan rantai pasok lokal (*short supply chains*) (Cave & Dredge, 2020; Musavengane, 2018).
   b. Kewirausahaan Berbasis Komunitas Inklusif: Penumbuhan usaha skala mikro yang dipimpin oleh kelompok perempuan dan kelompok marjinal (*women-led entrepreneurship*) guna menjamin distribusi manfaat yang adil (Peredo & Chrisman, 2006; Saputra et al., 2026).
   c. Reinvestasi Regeneratif (*Regenerative Reinvestment*): Mekanisme alokasi finansial wajib dari pendapatan pariwisata untuk dana konservasi ekologis dan pemeliharaan warisan budaya komunal (McKeeman et al., 2026; Pauls, 2022).

Analisis Komparatif Studi Kasus Global dan Indonesia

Secara kritis, penerapan indikator *regenerative tourism* menunjukkan dinamika yang berbeda tergantung pada tipologi destinasi dan kesiapan kelembagaan setempat. Berikut bagaimana rangkuman komparatif antara destinasi internasional dan destinasi di Indonesia.

1. Tipologi Destinasi Pedesaan dan Warisan Budaya

Destinasi pedesaan dan warisan budaya yang dianalisis, meliputi Naro (Italia), Tutukaka (Selandia Baru), dan Desa Wisata Penglipuran (Indonesia), memiliki keunggulan utama pada

kuatnya modal sosial (*social capital*) dan fondasi tatanan nilai lokal yang melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Di Naro dan Tutukaka, ikatan komunitas lokal menjadi daya tarik autentik yang mampu menahan laju depopulasi. Sementara itu, Penglipuran menonjol dengan kerangka *Organic Destination Social Responsibility* (DSR) berbasis filosofi Tri Hita Karana.

Kerentanan kritis pada tipologi ini ditandai oleh fenomena erosion by success paradox, di mana komersialisasi massif berisiko mengerosi keaslian ruang adat dan memicu kesenjangan literasi budaya antargenerasi. Indikator tata kelola utamanya mencakup tingkat transmisi literasi budaya pemuda, keberlanjutan kewirausahaan perempuan (PKK/koperasi), dan tata ruang berbasis hukum adat.

Tantangan terbesarnya adalah kelambatan proses pengambilan keputusan berbasis musyawarah komunal dalam mengimbangi kecepatan ekspansi pasar (Ferretti et al., 2023; Pratama et al., 2025; Saputra et al., 2026).

2. Tipologi Destinasi Wilayah Pesisir dan Bahari

Kawasan pesisir dan bahari, seperti Mar Menor (Spanyol), Akaroa (Selandia Baru), serta Desa Les, Pemuteran, dan Serangan (Indonesia), memiliki keunggulan pada kesadaran ekologis komunal dan kemitraan restorasi partisipatif. Di Pemuteran, tata kelola dibuktikan melalui inovasi restorasi terumbu karang komunal Biorock, dan di Desa Les melalui kearifan segara-gunung. Di Akaroa, keunggulannya terletak pada skema *visitor-led restoration*.

Risiko kerentanan utama di kawasan pesisir dipicu oleh intensitas pembangunan fisik di sempadan pantai, akumulasi polusi limbah, kerusakan terumbu karang, dan benturan kepentingan pemanfaatan ruang antara pemodal properti dengan hak akses masyarakat setempat. Untuk mengatasi hal ini, indikator regeneratif utama yang diperlukan meliputi Indeks Pemulihan Keanekaragaman Hayati Bahari, tingkat pengakuan hukum adat (*awig-awig segara*) dalam tata kelola, serta seberapa besar tingkat keterlibatan wisatawan.

Hambatan paling signifikan dalam hal ini mencakup fragmentasi birokrasi antar-instansi pemerintah, ketidakselarasan dalam pengaturan tata ruang pesisir, serta instabilitas pembiayaan untuk program pelestarian lingkungan (Permana & Anggratyas, 2026; Hussain & Fusté-Forné, 2021; Sudiartha et al., 2025; Widari & Prasiasa, 2026).

3. Tipologi Destinasi Pulau-Pulau Kecil (*Small Islands*)

Pulau-pulau kecil, seperti Kaua'i (Hawaii), Boracay (Filipina), South Penghu (Taiwan), Gili Trawangan, Kepulauan Momparang, dan Sebayur (Indonesia), merupakan tipologi yang paling rentan secara biofisik namun berpotensi unggul dalam ekonomi sirkular komunal. Di Momparang dan Penghu, keunggulan terlihat pada zonasi kapasitas daya dukung bahari, sementara di Maluku dan Nusa Tenggara bertumpu pada revitalisasi sasi laut atau awig-awig laut.

Krisis utama yang mengancam pulau-pulau kecil mencakup minimnya ketersediaan air bersih, akumulasi limbah plastik di wilayah perairan (*marine debris*), serta besarnya persentase keuntungan pariwisata yang mengalir keluar destinasi (*economic leakage*). Untuk mengatasi hal ini, indikator tata kelola regeneratif difokuskan pada penguatan ekonomi sirkular komunal, penegakan kuota wisata yang berpatokan pada daya dukung adaptif (*adaptive carrying*

capacity), serta optimalisasi retensi pendapatan ekonomi di tingkat lokal.

Kendala terbesar bagi tata kelola di kawasan pulau kecil terletak pada tingginya kontrol bisnis oleh pihak eksternal (*absentee ownership*), kurangnya daya dukung infrastruktur esensial, serta ancaman penyalahgunaan narasi regeneratif yang hanya dijadikan alat pemasaran semu atau *greenwashing* (Fauzi et al., 2024; Murdana et al., 2026; Tops & Lamers, 2024).

Dinamika dan Hambatan Tata Kelola Regeneratif

Analisis kritis terhadap hasil sintesis global menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam transisi menuju *regenerative governance* bukan terletak pada ketiadaan formulasi konsep, melainkan pada kesenjangan eksekusi (*implementation gap*) dan struktur tata kelola (*governance inertia*) (Becken & Kaur, 2021; Pung et al., 2024; Sudiartha et al., 2025).

Pertama, pada destinasi pedesaan dan warisan budaya (seperti Kasus Naro di Italia maupun Desa Penglipuran di Indonesia), muncul fenomena yang dikenal sebagai *paradoks erosi akibat keberhasilan* (*erosion by success paradox*) (Pratama et al., 2025). Ketika destinasi mencapai puncak popularitas, tekanan komersialisasi ekonomi mendorong godaan untuk meningkatkan kapasitas fasilitas secara fisik dan mengabaikan ritual adat (Pratama et al., 2025; Saputra et al., 2026). Tata kelola regeneratif di Penglipuran berhadapan dengan *consensus inertia*, di mana lambatnya pengambil keputusan adat akibat sistem musyawarah komunal sering kali kewalahan menahan laju investasi luar (Saputra et al., 2026). Hal ini membuktikan bahwa keberadaan kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana* memerlukan modernisasi indikator pengukuran kinerja (KPI) yang tidak lagi bertumpu pada jumlah tiket masuk, melainkan pada tingkat keterlibatan pemuda dan pemeliharaan struktur fisik rumah adat (Pratama et al., 2025; Sudiartha et al., 2025).

Kedua, pada konteks pesisir dan pulau-pulau kecil (seperti Boracay di Filipina, Kaua'i di Hawaii, serta Gili Trawangan dan Kepulauan Momparang di Indonesia), kerentanan ekologis berbenturan langsung dengan ketergantungan ekonomi yang ekstrem (Fauzi et al., 2024; Tops & Lamers, 2024; Zaman et al., 2023). Di Boracay maupun Gili Trawangan, dominasi kepemilikan modal asing (*absentee ownership*) memicu kebocoran ekonomi (*economic leakage*) yang signifikan, sehingga pendapatan pariwisata gagal mengalir kembali menjadi dana restorasi lingkungan setempat (Murdana et al., 2026; Tops & Lamers, 2024). Model pariwisata regeneratif di Pemuteran (Bali) melalui teknologi Biorock atau di Kepulauan Momparang memperlihatkan bahwa restorasi lingkungan hanya berhasil apabila dipimpin langsung oleh komunitas lokal (*bottom-up stewardship*) yang ditopang oleh kemitraan teknis dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (Fauzi et al., 2024; Widari & Prasiasa, 2026).

Ketiga, hambatan metodologis utama yang teridentifikasi secara global adalah ketergantungan pengelola destinasi pada indikator konvensional (Ferretti et al., 2023; McLoughlin, 2025; Sudiartha et al., 2025). Sebagian besar organisasi pengelola destinasi (*Destination Management Organization*/DMO) di tingkat internasional maupun nasional belum memiliki instrumen kuantitatif untuk mengukur derajat "kesembuhan" sosio-ekologis (Hall et al., 2024; Sudiartha et al., 2025). Akibatnya, narasi *regenerative tourism* berisiko terdegradasi menjadi sekadar jargon

pemasaran jika tidak diimbangi dengan kewajiban pelaporan indikator regeneratif (seperti *Net-Positive Biodiversity Index* dan *Community Wellbeing Metric*) dalam kebijakan resmi pemerintah daerah.

Dengan demikian, pariwisata regeneratif menuntut pembentukan kerangka *adaptive co-management*, sebuah tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, kelembagaan adat, dan kepemimpinan pemuda untuk merevisi tolok ukur keberhasilan pembangunan pariwisata masa depan

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menjawab permasalahan utama mengenai keterbatasan pendekatan keberlanjutan konvensional yang terbukti gagal menahan kerusakan lingkungan dan pergeseran nilai budaya di berbagai destinasi wisata dunia. Melalui analisis komparatif atas studi kasus global dan lokal, mulai dari wilayah pedesaan warisan budaya, kawasan pesisir, hingga pulau-pulau kecil, terungkap bahwa akar masalahnya terletak pada cara pandang yang keliru, di mana keberhasilan destinasi selalu diukur dari sekadar angka kunjungan dan keuntungan ekonomi semata. Untuk mengatasi krisis tersebut, pariwisata regeneratif hadir menawarkan arah baru melalui pergeseran tolok ukur pengelolaan destinasi. Pengelolaan ini menuntut hadirnya dampak positif yang nyata, di mana pariwisata tidak hanya mengambil manfaat ekonomi, tetapi juga berkewajiban memulihkan alam yang rusak dan memperkuat kehidupan masyarakat setempat.

Melalui pendekatan kualitatif dan sintesis data komparatif, penelitian ini berhasil merumuskan indikator tata kelola destinasi berbasis pariwisata regeneratif yang mencakup tiga aspek utama: pemulihan ekosistem alam, perbaikan kualitas sosial-budaya berbasis kearifan lokal, serta pemerataan ekonomi warga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pariwisata regeneratif dapat terwujud apabila kelembagaan lokal dan adat diberikan otoritas penuh sebagai pemegang kebijakan, yang didukung oleh kepemimpinan generasi muda serta pelibatan wisatawan sebagai mitra pemulihan lingkungan. Tanpa adanya keberanian dari pemerintah dan pengelola destinasi untuk mengganti indikator keberhasilan lama yang berfokus pada kuantitas angka menjadi indikator baru yang mengukur tingkat kesehatan alam dan kebahagiaan masyarakat, konsep pariwisata regeneratif hanya akan menjadi slogan pemasaran semata tanpa membawa perubahan nyata di lapangan.

Penelitian ini memiliki batasan karena bersandar sepenuhnya pada data sekunder dan sintesis literatur (*systematic narrative review*). Meskipun telah berupaya melakukan triangulasi dengan kearifan lokal, validitas indikator tata kelola regeneratif yang dihasilkan belum diuji secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penerapannya pada kondisi riil di tingkat Organisasi Pengelola Destinasi (DMO) mungkin memerlukan penyesuaian (*adjustment*) terhadap kapasitas birokrasi dan anggaran daerah.

Saran

Pemerintah daerah bersama Organisasi Pengelola Destinasi direkomendasikan untuk segera merevisi Indikator Kinerja Utama (KPI) pembangunan pariwisata daerah. Tindak lanjut nyata harus diwujudkan melalui pergeseran tolok ukur dari sekadar target kuantitas kunjungan wisatawan dan

pendapatan devisa menuju indikator pemulihan ekologis dan sosial yang terukur. Kebijakan ini perlu memuat aturan tegas mengenai alokasi sebagian pendapatan pariwisata secara khusus untuk dana pemeliharaan warisan budaya dan restorasi alam, pelibatan kelembagaan lokal/adat sebagai pemegang otoritas utama dalam perancangan destinasi, serta penetapan batas kuota kunjungan yang fleksibel berbasis pada kapasitas pemulihan lingkungan setempat.

Secara akademis, para peneliti pariwisata disarankan untuk melanjutkan kajian ini melalui pengujian kuantitatif dan perumusan matriks indeks regeneratif baku (*standardized regenerative index*) menggunakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Implikasi akademis dari penelitian ini mendorong perlunya riset longitudinal lintas destinasi untuk mengukur secara presisi efektivitas penerapan indikator regeneratif terhadap pemulihan keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan komunitas dari waktu ke waktu. Langkah ini penting agar teori pariwisata regeneratif terus berkembang secara kokoh dan teruji, serta menjadi panduan praktis yang adaptif bagi pengelolaan destinasi baik di tingkat nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

Agapito, D., Herington, C., & Ruhanen, L. (2023). Destination social responsibility: Stakeholder perceptions and dimensions in community-based tourism. *Journal of Sustainable Tourism, 31*(2), 430-452.

Anggratyas, P. A. R. (2025). Pariwisata Alam, Ekowisata, dan Konservasi sebagai Nilai Jual Utama. Dalam *Pengembangan pariwisata berkualitas di Indonesia: Tantangan, peluang, dan strategi* (182-205). Yaguwipa.

Becken, S., & Kaur, J. (2021). Anchoring “tourism value” within a regenerative tourism paradigm – a government perspective. *Journal of Sustainable Tourism, 30*(6), 1365-1383.

Bellato, L., & Pollock, A. (2025). The evolution of regenerative tourism: What the research can and cannot yet show. *Tourism Geographies, 27*(3-4), 302-321.

Bellato, L., Frantzeskaki, N., Lee, E., Cheer, J. M., & Peters, A. (2023). Transformative epistemologies for regenerative tourism: Towards a decolonial paradigm in science and practice. *Journal of Sustainable Tourism, 32*(6), 298-311.

Buckton, M., Smith, K., & Jones, A. (2023). The Regenerative Lens framework: Systemic perspectives on well-being and tourism. *Annals of Tourism Research, 98*, 103512.

Cave, J., & Dredge, D. (2020). Regenerative tourism needs diverse economic practices. *Tourism Geographies, 22*(3), 503-513.

Das, M., & Mishra, A. (2026). Circular economy and regenerative practices in island destinations: A qualitative study. *Journal of Environmental Management in Tourism, 15*(1), 112-130.

Dredge, D. (2022). Regenerative tourism: Transforming mindsets, systems and practices. *Journal of Tourism Futures, 8*(3), 269-281.

Duarte, C. M., Eguíluz, V. M., & Smith, J. (2024). Measuring coral cover recovery in regenerative marine tourism zones. *Marine Policy, 140*, 104523.

Dwi, R., Susanti, H., & Pratama, A. (2026). Hambatan operasionalisasi

indikator pariwisata regeneratif di desa wisata pesisir Indonesia. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 18*(2), 45-60.

Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. *Current Issues in Tourism, 6*(5), 369-414.

Fauzi, D., Syafutra, R., & Agustiana, E. (2024). Regenerative marine tourism strategy in the ecosystem of Momparang Archipelago, East Belitung. *Proceedings International Conference on Sustainable Tourism*, 102-115.

Ferretti, V., Nicolini, E., & Bianchi, L. (2023). Revitalizing rural destinations: Ecological restoration and place-based approaches in Naro, Italy. *Journal of Rural Studies, 89*, 234-245.

Gibbons, L. V. (2020). Regenerative—the new sustainable? *Sustainability, 12*(13), 5483.

Grilli, G., Tyllianakis, E., Luisetti, T., Ferrini, S., & Turner, R. K. (2021). Prospective tourist preferences for sustainable tourism development in Small Island Developing States. *Tourism Management, 82*, 104178.

Hall, C. M., Sudiartha, I. K., & Williams, S. (2024). Quantifying regenerative tourism: The challenge of developing socio-ecological metrics. *Current Issues in Tourism, 27*(5), 780-798.

Hussain, A. (2025). *What Is Regenerative Tourism And Why It Matters Now In 2026?* Luminous Insights Institute for Sustainability.

Hussain, A., & Fusté-Forné, F. (2021). Regenerative tourism: The challenge of Mar Menor, Spain. *Tourism Planning & Development, 18*(5), 587-603.

Iddawala, A., & Lee, D. (2025). Living systems thinking in regenerative destination governance. *Annals of Tourism Research Empirical Insights, 6*(1), 100125.

McKeeman, J., Price, L., & Te Aho, M. (2026). A regenerative approach to tourism: Learnings from community enterprises and Mātauranga Māori. *Journal of Sustainable Tourism, 34*(1), 45-63.

McLoughlin, E. (2025). Creative industries as a multiplier for regenerative tourism practices. *Tourism Management Perspectives, 48*, 101112.

Montealegre, A. (2019). Overtourism and coastal conflicts in Spanish tourist destinations. *Ocean & Coastal Management, 179*, 104860.

Montes de Oca, V. (2024). Collaborative governance and social responsibility in community development. *Public Policy and Administration, 39*(2), 150-168.

Murdana, I. K., Utama, I. G. B. R., & Sudiartha, I. W. (2026). Regenerative tourism strategy and carrying capacity at Gili Trawangan, Indonesia. *Jurnal Pariwisata Terapan, 10*(1), 75-92.

Musavengane, R. (2018). Toward pro-poor local economic development in Zimbabwe: The role of pro-poor tourism. *Tourism Management Perspectives, 25*, 205-215.

Nicolini, E., Bianchi, L., & Ferretti, V. (2025). Combating depopulation through community-based tourism in Italian rural heritage sites. *European Planning Studies, 33*(2), 210-228.

Pauls, J. (2022). Reinvesting in the commons: Financial mechanisms for regenerative tourism. *Journal of Ecotourism, 21*(4), 312-329.

Peredo, A. M., & Chrisman, J. J. (2006). Toward a theory of community-based enterprise. *Academy of Management Review, 31*(2), 309-328.

Permana, I. G. A., & Anggratyas, P. A. R. (2026) Analisis Normatif Peraturan Pariwisata Nusa Tenggara Barat Dan Implikasinya Bagi Pengembangan Pariwisata Pulau Lombok.

Pollock, A. (2019). *Regenerative Tourism – The Natural Maturation of Sustainability*. The Regenesis Group.

Pratama, I. G. N., Sujana, I. W., & Saputra, I. K. (2025). Revitalizing Destination Social Responsibility through Regenerative Tourism: A Case Study of Penglipuran Village, Bali. *Asian Journal of Business and Management Sciences, 12*(3), 45-62.

Pung, J. M., Ruhanen, L., & Arcodia, C. (2024). Regenerative tourism for sustainable transformation: A systemic review. *Journal of Sustainable Tourism, 32*(1), 1-18.

Saputra, I. K., Pratama, I. G. N., & Dewi, N. L. P. (2026). Penglipuran village's cultural traditions and local wisdom shaping a distinctive regenerative tourist destination in highland Bali. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 16*(2), 234-250.

Sudiartha, I. W., Hall, C. M., & Murdana, I. K. (2025). The impact of regenerative practices and adaptive carrying capacity in Bali's coastal destinations. *Tourism Planning & Development, 22*(1), 88-105.

Taufik, M., Rahman, A., & Setiawan, B. (2025). Utilization organic and inorganic waste for waste reduction in coastal tourism. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 3*(4), 112-120.

Tops, M., & Lamers, M. (2024). Tourism transition in peripheral rural areas and small islands: Economic leakage and absentee ownership. *Journal of Rural Studies, 95*, 103445.

Widari, D. A., & Prasiasa, D. P. (2026). Regenerative Tourism as a New Paradigm for Island and Marine Tourism in Pemuteran and Les Village. *Jurnal Ilmiah Pariwisata, 11*(2), 150-168.

Widari, D. A., Prasiasa, D. P., & Astuti, N. W. (2025). Regenerative tourism model: Adaptive cycle of tourism system and indicators of Tri Hita Karana. *International Journal of Tourism Research, 27*(4), 512-528.

Wu, C. C., & Tsai, H. (2016). Capacity management for sustainable tourism in South Penghu Marine National Park. *Ocean & Coastal Management, 121*, 104-113.

Zaman, U., Raza, S. H., & Khan, S. W. (2023). Nexus of regenerative tourism destination competitiveness, climate advocacy and visit intention. *Sustainability, 15*(6), 1-20.